

SKRIPSI
PENGATURAN KEBEBASAN BERAGAMA DITINJAU DARI
***INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS* DAN**
EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS
(Studi Kritis Terhadap Larangan Pemakaian Jilbab Di Tempat Kerja Swasta
Dalam Putusan *European Court of Justice* Nomor C-157/15 Dan C-188/15)

(Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum)

Oleh :

M HAFIZH ALMUFRA

1310112142

Pembimbing I : Dr. Mardenis, S.H., M.Si

Pembimbing II : Dewi Enggriyeni, S.H., M.H.

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

No. Reg. 5223/PK-VII/III/2018

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: M HAFIZH ALMUFRA	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta, 8 Januari 1996 b) Nama Orang Tua: Adrimal Ludin, Ummu Fitrah c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Internasional e) No.BP: 1310112142	f) Tanggal Lulus : 3 Agustus 2018 g) Predikat Lulus :Sangat Memuaskan h) Lama Studi : 5 Tahun i) IPK : 3,21 j) Alamat : Jl. Biduri Y No.17 Jatisari, Bekasi	

PENGATURAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DITINJAU DARI *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS* DAN *EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS* (Studi Kritis Terhadap Larangan Pemakaian Jilbab Di Tempat Kerja Swasta Dalam Putusan European Court Of Justice Nomor C-157/18 Dan C-188/15)

(M Hafizh Almufra, 1310112142, Hukum Internasional (PK VII),
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 83 Halaman, 2018

ABSTRAK

Pada tahun 2017 lalu *European Court of Justice* (ECJ) telah mengeluarkan putusan pada kasus nomor C-157/15 dan C-188/15 dilatarbelakangi oleh pemecatan dua karyawan swasta yang mengenakan jilbab dari dua negara yang berbeda. Hal tersebut terjadi karena perusahaan mempunyai aturan internal yang melarang hal tersebut dan yang lainnya karena pengaduan dari klien perusahaan. Putusan tersebut menimbulkan pro-kontra karena ada yang pendapat yang menganggap melanggar Hak Kebebasan Beragama. Karena putusan ECG bersifat final, putusan ini telah berlaku bagi seluruh perusahaan swasta di Eropa. Berikutnya penulis melakukan penelitian mengenai pengaturan hak kebebasan beragama ditinjau dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *European Convention on Human Rights* (ECHR) dikaitkan dengan larangan pemakaian jilbab di tempat kerja swasta di Eropa serta hubungan kedua putusan ECJ dengan ICCPR dan ECHR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen. Data yang diperoleh selama penelitian kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif, sehingga disajikan dalam bentuk pemaparan dan uraian hasil penelitian. Hasil penelitian dari studi kepustakaan menunjukkan bahwa ICCPR lebih banyak membahas hak kebebasan beragama dibanding ECHR dan jika dikaitkan dengan pelarangan jilbab di tempat kerja swasta keduanya mengatur bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama namun ECHR kurang mempertegas hal tersebut dikarenakan faktor budaya di Eropa juga kurang definisi konkret mengenai agama didalam kedua perjanjian internasional. Putusan ECJ C-157/15 menyatakan bahwa pemecatan karyawan dalam kasus tersebut merupakan diskriminasi tidak langsung, sedangkan kasus C-188/15 menyatakan bahwa pemecatan karywan dalam kasus tersebut merupakan diskriminasi langsung. Kedua putusan tersebut tidak berpengaruh pada pengaturan hak kebebasan beragama ICCPR karena Uni Eropa tidak menandatangani ICCPR namun puusan tersebut memiliki pengaruh terhadap ECHR karena menambah pengaturan baru yang berkaitan dengan kebebasan beragama.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 3 Agustus 2018.

Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
Nama terang	Prof. H. Firman Hasan, S.H., LL.M	Sri Oktavia, SH., M.Sc., PhD

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional : **Hj. Magdariza, S.H., M.H.**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: